

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni Bandung.
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemanfaatannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- A. P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.
- A. P. Parlindungan, 1994, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian III*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Damsar, 2005, *Tanah Ulayat Dan Ketanahan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian dan Pembangunan Pertanian Yayasan Padi Indonesia.
- H.M. ARBA, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan Rasyid, 2003, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, Cetakan Pertama*, Jakarta: Al-mawardi Prima.
- Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, 2003, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia Bukit Tinggi.
- Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, 1978, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Bandung: Rosda.
- John Salondenho, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: cetakan Kedua Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan keempat.
- Maria Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Kompas.

Moh. Anwar, "Mu'amalat, Munakahat, Fara'id, dan Jinayat", dalam Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta

R. Sutanto, 1980, *Hukum Pertanahan (Agraris)*, Jakarta: Cetakan 1, Pradnya Paramita.

Soerjono Soekamto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 *Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu*.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*.

C. Website

AhmadWiki,

http://id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah/Tata_Cara_Pengadaan_dan_Persyaratan_Pembayaran_Pengadaan_Tanah (diunduh pada Senin, 29 Juni 2015 Pukul 15.30 WIB)

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulyat (diunduh kamis 04 juni 2015 pukul 11.44 WIB)

http://googleweblight.com/?lite_url=http://arti-defenisi.pengertian.info/pengertian-hukum-tanahadat/&ei=BXiTMq_3&lc=idID&s=1&ts=1433394748&sig=AG8UcumSj5qF3t8Cz1nujS57RspeDqWTxA (diunduh kamis 04 Juni 2015 pukul 12.17 WIB)

http://www.trp.or.id/komponen/produk/the_file/Prosiding-Seminar%20Tanah%20Adat%20Ulayat%20plus%20Cover.pdf
(diunduh selasa 08 Maret 2016 pukul 15.23 WIB)

